

ISSN 1411-3457

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XIII • Nomor 2 • Desember 2009

TERAKREDITASI Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas
Nomor: 65a/DIKTI/Kep/2008

PERTAUTAN TEOLOGI DAN POLITIK:
KAJIAN TERHADAP ALIFAN RELIGIO-POLITIK SYI'AH DAN KHAWARIJ
Mustain

TEOLOGI RASIONAL:
TELAAH ATAS PEMIKIRAN KALAM MUHAMMAD ABDUH
Makrum

TEOLOGI LIBERALISME:
ANTARA CITA-CITA DAN REALITA
Aswadi

ISLAM DAN PEMBERONTAKAN TERHADAP STATUS QUO:
TELAAH ATAS PEMIKIRAN TEOLOGI SOSIAL ALI SYARIATI
Mukhlis

PAHAM TEOLOGI DAN VISI KEBANGSAAN
MASYARAKAT LOMBOK
Asnawi

TERA ULANG PERAN PROFETIK TUAN GURU
DALAM KONTEKS KEBERASAN BERAGAMA DI PULAU LOMBOK
Fawaizul Umam

ISI

TRANSLITERASI ARTIKEL

- ديدي وحي الدين السنوسي حفريات علم الكلام ودور المتكلمين
في الثقافة الإسلامية • 239-268
- Mustain** Pertautan Teologi dan Politik:
Kajian terhadap Aliran Religio-Politik
Syi'ah dan Khawarij • 269-294
- Makrum** Teologi Rasional:
Telaah atas Pemikiran Kalam
Muhammad Abduh • 295-314
- Halid Al-Kaff** Perspektif Epistemologis
Teologi Islam Liberal • 295-314
- Aswadi** Teologi Liberalisme:
Antara Cita-Cita dan Realita • 315-330
- Nurul Anam** Mengurai Benang Kusut
Indikasi Kematian Massal Eksistensi
Tuhan di Abad Globalisasi • 295-314
- Mukhlis** Islam dan Pemberontakan terhadap
Status Quo: Telaah atas Pemikiran
Teologi Sosial Ali Syariati • 331-356
- Asnawi** Paham Teologi dan Visi Kebangsaan
Masyarakat Lombok • 357-382
- Fawaizul Umam** Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru
dalam Konteks Kebebasan Beragama
di Pulau Lombok • 363-416

INDEKS

PERTAUTAN TEOLOGI DAN POLITIK: Kajian terhadap Aliran Religio-Politik Syi'ah dan Khawarij

Mustain *

Abstract

The history of emergence of sects of Islamic theology can not be separated from political issues as shown in the history of Shi'ite, Khawarij, Murjiyah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilite, and Ash'arite. This paper tries to assess such linkage, particularly in the case of Shi'ite and Khawarij. The emergence of both sects was backed by sharp tribal political competition among the supporters of Ali ibn Abi Talib; both sects then showed their characteristics more as political stream (religio-political) rather than sects of theology. Although both, especially Khawarij, have important contributions in the debate concerning major sins commit which then lead to debate about broader and in-depth issues of divinity, but their political activities are more dominant than their theological thoughts. While the Shi'ite was preoccupied by searching for the ideal figure of priest (imam), Khawarij flow into a political insubordination movement to the government that they consider infidels.

Keywords: Religio-Politik, Tahkim, *Lâ Hukma illâ li Allâh*, Imâmah, Ghadir Khum.

ALIRAN atau sekte yang pertama muncul dalam Islam adalah aliran teologi, namun fakta sejarah juga menunjukkan bahwa kemunculan aliran-aliran teologi mempunyai pertautan yang kuat dengan permasalahan politik. Fenomena itu tidak hanya nampak pada aliran teologi yang muncul pada periode yang lebih awal, tetapi juga pada aliran-aliran yang muncul lebih belakangan. Menurut Watt, gagasan-gagasan yang muncul dalam bidang

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram. email: mustainrema@yahoo.com

teologi selalu mempunyai rujukan politik dan sosial.¹ Karena itu, untuk memperoleh gambaran lebih utuh tentang kemunculan dan perkembangan aliran-aliran teologi, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik yang terjadi pada masa itu. Keduanya saling berjaln berkelindan, sehingga corak pemikiran teologi sangat erat kaitannya dengan ide politik atau pandangan dunia (*weltanschauung*)nya.²

Pada tiap periode pertautan antara teologi dan politik memiliki titik tekan yang berbeda, sehingga mengakibatkan munculnya corak pemikiran teologi yang berbeda pada masing-masing aliran. Pada periode awal kemunculannya, pertautan antara keduanya nampak lebih kental permasalahan politiknya sehingga aliran teologi yang muncul menunjukkan corak politik yang lebih kuat. Sementara pada periode yang lebih belakangan, corak teologi lebih menonjol dibanding corak politiknya. Tulisan ini berusaha memahami bagaimana pertautan antara pemikiran teologi dengan politik, khususnya yang terjadi pada periode awal kemunculan aliran teologi sebagaimana yang tergambarkan pada aliran Syi'ah dan Khawarij.

Konflik Politik Antara Khalifah Ali dan Mu'awiyah

Permasalahan sosial-politik yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad mulai memicu munculnya benih-benih perpecahan di kalangan kaum muslim. Perpecahan dipicu oleh munculnya perbedaan pendapat mengenai bagaimana mekanisme (sistem) penggantian kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara dan pemerintahan. Selanjutnya muncul tiga ide mengenai mekanisme politik yang harus ditempuh, yaitu kembali ke sistem kabilah, menggunakan sistem hak warisan, dan menerapkan sistem permusyawaratan.³ Ide pertama didukung oleh kelompok Banu Khazraj dan kelompok separatis (*riddah*), namun belakangan kelompok yang pertama sadar dan menarik diri dari kelompok pertama. Sementara kelompok

¹W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, ter. Umar Basalim (Jakarta: P3M, 1987), 8.

²Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 13.

³Shiddiqi, *Jeram-Jeram...*, 14-5.

kedua (*riddah*) tetap pada pilihannya, sehingga ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar. Ide yang kedua didukung oleh al-Abbas, Ali, dan Zubair. Sedangkan pemikiran ketiga didukung oleh kaum Muhajirin, kecuali Bani Hasyim.

Pilihan-pilihan sistem politik di atas, khususnya ide tentang hak warisan dan ide permusyawaratan, terealisasi dalam praktik politik yang ditandai dengan munculnya calon-calon untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat yang diajukan masing-masing kelompok. Kelompok pertama, yang terdiri dari Bani Abbas dan keluarganya, mendorong Ali untuk maju menjadi calon. Sementara kelompok kedua, kaum Muhajirin, mengusung Abu Bakar sebagai calon. Setelah melalui proses politik yang relatif lancar, calon yang diusung kaum Muhajirin itu dibaiat oleh kaum muslim menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslim.

Perbedaan pilihan politik di atas terbukti berpotensi menimbulkan konflik di kalangan kaum muslim. Potensi konflik itu pecah menjadi konflik terbuka dalam bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh mereka yang menjadi pendukung politik sistem kabilah. Pembangkangan itu memaksa Abu Bakar yang baru dibaiat menjadi *amirul mukminin*, untuk segera mengerahkan tentara guna menumpas kelompok *riddah* (pemberontak). Keberhasilan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq menumpas pembangkangan kelompok *riddah* tidak berarti matinya sistem kabilah di kalangan kaum muslim. Sistem kabilah terus terpelihara dan semakin menguat pada masa kekhilafahan Usman bin Affan. Kebijakan-kebijakan politik Khalifah Usman telah menempatkan kontrol keluarga terhadap urusan dan kekuasaan negara, serta kehidupan sosial politik, sehingga membangkitkan dendam lama antara dua keluarga utama suku Quraisy, yaitu permusuhan antara putra-putra Umayyah dan Hasyim sebagaimana yang terjadi pada masa lampau ketika keduanya memperebutkan kekuasaan untuk memelihara Ka'bah.⁴ Bangkitnya sistem kabilah itu mendorong munculnya kekerasan sebagai bentuk penyelesaian pertentangan politik yang

⁴Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, ter. Munir A. Mu'in (Bandung: Mizan, 2004), 107.

terjadi antara Khalifah Usman dengan para pemberontak, sehingga mengakibatkan terbunuhnya khalifah ketiga itu.

Pembunuhan terhadap Khalifah Usman menjadi permulaan terjadinya Bencana Besar (*al-Fitnah al-Kubrâ*) pertama⁵ yang membawa implikasi yang jauh dalam sejarah perkembangan Islam, tidak hanya dalam masalah politik, tetapi juga dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran agama.⁶ Secara politik, peristiwa itu mengakibatkan terjadi peralihan kekuasaan Islam dari sistem khilafah kepada bentuk monarki kerajaan.⁷ Sementara dari segi ajaran, kisruh politik itu telah menyebabkan lahirnya pemikiran-pemikiran dalam bidang akidah (teologi) sebagaimana yang pertama dilontarkan kelompok Khawarij.

Naiknya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak hanya memperoleh pengakuan mayoritas kaum muslim. Lebih dari itu, oleh para pendukungnya diyakini sebagai kemenangan atas aristokrasi Quraisy dan kemenangan kebenaran agama. Keyakinan itu sebagaimana diungkapkan seorang pendukung Ali yang bernama Tsâbit bin Qays bin Syammâs:

“Demi Allah, wahai *Amir Al-Mu'minin*, meskipun mereka mendahului kamu dalam kekuasaan khilafah, mereka tidak dapat menandingimu dalam agama. Kedudukanmu tidak pernah dapat ditutup-tutupi, juga derajatmu yang tinggi tidak dapat diabaikan. Mereka semua membutuhkanmu ketika menghadapi situasi yang tidak mereka kuasai ilmunya. Namun, dengan pengetahuanmu, kamu tidak membutuhkan siapa pun”.⁸

⁵Hodgson mencatat beberapa peristiwa yang terjadi sebagai rangkaian dari *al-Fitnah al-Kubrâ* pertama. Tahun 656 Usman dibunuh di Madinah, kemudian Ali menggantikannya menjadi khalifah, termasuk terjadinya perang Unta setelah itu. Tahun 657 terjadi Perang Shiffin, yang menghasilkan arbitrase setahun berikutnya (658). Tahun 660 Mu'awiyah memproklamkan diri sebagai khalifah di Yerusalem, dan Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam tahun 661. Lihat Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Peradaban Dunia, Jilid Pertama: Masa Klasik Islam, Buku Pertama: Labirnya Sebuah Tatanan Baru*, ter. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 1999), 311.

⁶Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), 10.

⁷Ayoub, *The Crisis...*, 62.

⁸*Ibid.*, 130.

Namun demikian, hal itu tidak dapat menghapus kenyataan adanya ketidakpuasan para pendukung Khalifah Usman, yang menuntut agar Khalifah Ali menangkap dan mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Usman bin Affan. Sementara tuntutan itu diajukan, kelompok yang mengajukan tuntutan itu tahu benar bahwa tuntutannya itu tidak akan dapat dipenuhi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, tuntutan itu lebih mencerminkan keinginan balas dendam sebagai nilai yang melekat dalam tradisi kesukuan Arab ketimbang tuntutan keadilan. Dalam perkembangannya, tuntutan-tuntutan itu, karena belum dapat tertangani dengan tuntas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menyisakan ketidakpuasan di kalangan para pendukung khalifah ketiga itu, terutama yang digalang oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam (Syiria). Ketidakpuasan mereka itu kemudian dijadikan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai alasan untuk tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai *Amir al-Mu'minin*. Penolakan Mu'awiyah itu kemudian diiringi dengan klaimnya sebagai khalifah tandingan. Klaim paling tegas dari Mu'awiyah atas kekhalifahan diungkapkannya dihadapan rakyat Suriah sebagai berikut:

“Katakanlah kepadaku, mengapa Ali ibn Abi Thalib lebih layak menduduki jabatan itu daripada aku? Demi Allah aku adalah juru tulis Rasulullah. Saudariku (Umm Habibah, putri Abu Sufyan) adalah istri Rasulullah. Selain itu, aku adalah gubernur di bawah Umar bin al-Khaththab dan Usman ibn Affan. Ibuku adalah Hindun binti Utbah ibn Rabi'ah (artinya ia berasal dari keturunan terhormat) dan ayahku adalah Abu Sufyan bin Harb. Tambahan, meskipun rakyat Hijaz dan Irak berbaiat kepada Ali, rakyat Suriah berbaiat kepadaku. Rakyat ketiga wilayah ini setara (dalam masalah kehormatan), dan siapapun yang dapat merebut sesuatu dengan kekuatan, maka sesuatu itu akan menjadi miliknya”.⁹

Pertentangan antara Ali dan Mu'awiyah kemudian berkembang menjadi peperangan, yaitu Perang Shiffin yang dimulai pada bulan Dzulhijjah 36 H-Shafar 37 H (Juni-Juli 657 M) dan berakhir tanpa kepastian pada Ramadhan 37 H (Februari

⁹*Ibid.*, 154.

658 M).¹⁰ Berbeda dengan Perang Jamal yang hanya melibatkan dua kelompok pasukan, Perang Shiffin melibatkan penduduk Suriah dan Irak, sehingga menjadi konflik yang berdarah dan berlarut-larut yang berdampak pada semakin tajamnya perpecahan kaum muslim yang menjadi pendukung keluarga Umayyiah dan keluarga Hasyim.

Perang Shiffin dan Lahirnya Syi'ah dan Khawarij

Sebagaimana dicatat dalam buku-buku sejarah, perang Shiffin diakhiri dengan *tabkîm* atau arbitrase yang berlangsung di Adzrah, padang pasir di Siria dengan tidak membawa hasil karena baik Ali maupun Mu'awiyah sama-sama ditolak.¹¹ Penyelesaian dengan arbitrase berawal dari tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh kelompok Mu'awiyah ketika menyadari pasukannya mulai terdesak oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Karenanya tawaran yang diajukan itu bukan dilandasi kepentingan keagamaan atau moral, tetapi merupakan siasat untuk menghindari kekalahan. Siasat itu merupakan bagian dari strategi yang digagas oleh Amr bin Ash untuk mengompromikan kekuasaan Ali dengan menempatkan Mu'awiyah sejajar dengannya. Tujuan akhirnya adalah mencabut kekuasaan Ali sebagai khalifah, dan menyerahkannya kepada Mu'awiyah atau orang lain yang dapat melanggengkan aristokrasi Quraisy.¹²

Tawaran yang diajukan kubu Mu'awiyah itu terbukti berhasil memicu terjadinya perpecahan di kelompok Ali menjadi faksi-faksi. Mayoritas pasukan Ali bin Abi Thalib, karena sudah letih berperang dan khawatir akan timbulnya akibat yang lebih parah, setuju dengan gencatan senjata. Sementara minoritas lainnya, yang sangat yakin akan memenangkan peperangan, menyangsikan niat tulus Mu'awiyah untuk gencatan senjata, dan menyarankan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan peperangan sampai tuntas. Sedangkan sebagian kecil menyatakan ketaatan kepada keputusan Ali bin Abi Thalib apapun konsekuensinya.¹³

¹⁰*Ibid.*, 241.

¹¹Hodgson, *The Venture...*, 311.

¹²Ayoub, *The Crisis...*, 173.

¹³*Ibid.*, 173-174.

Pada akhirnya Ali tidak mampu menolak desakan mayoritas pendukungnya untuk menerima gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata itu dituangkan dalam sebuah dokumen arbitrase yang ternyata justru melemahkan posisi Ali karena kedudukannya sebagai khalifah disejajarkan dengan Mu'awiyah yang berkedudukan sebagai gubernur. Kondisi itu tidak terlepas dari kecerdikan Amr bin Ash yang mewakili pihak Mu'awiyah dan kelemahan Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili kelompok Ali. Strategi Amr bin Ash telah mengalahkan perasaan takwa Abu Musa al-Asy'ari, dan hasil *tabkīm* menjadikan hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menjadi hilang. Hal itu ditunjukkan dengan sebutan yang digunakan bagi keduanya dalam dokumen itu sama, yaitu "amir" dan dua wakil masing-masing dengan "*hakamayn*". Sehingga secara implisit, hak prerogatif kekhalifahan Ali ditolak dalam dokumen itu. Selanjutnya, kedua arbiter diberi waktu setahun untuk mencapai kesepakatan, dan jika keduanya gagal, maka status perang berlaku kembali antara kedua kelompok.¹⁴

Dokumen arbitrase yang merugikan pihak Ali itu kemudian ditolak oleh sebagian pendukungnya yang sebelumnya mendesak Ali untuk menerima ajakan gencatan senjata yang diajukan Mu'awiyah. Mereka menganggap bahwa isi dokumen itu telah menyimpang dari hukum al-Qur'an. Hal itu terjadi segera setelah al-Asy'ats (Abu Musa al-Asy'ari) mengumumkan isi dokumen kepada kedua belah pihak. Penolakan itu dipelopori orang-orang dari suku Rasib dan Tamim dengan menyatakan ungkapan *lā hukma illā li Allāh* (tiada hukum kecuali hukum Allah). Kemudian semakin banyak orang-orang yang berteriak melontarkan penolakan dan menyatakan:

"Hukum hanya milik Tuhan, wahai Ali, bukan milikmu! Kami tidak akan menerima manusia menetapkan hukum atas nama agama Tuhan. Tuhan telah menetapkan keputusan terhadap Mu'awiyah dan pasukannya: mereka tunduk pada keputusan kita atas mereka atau mereka akan terbunuh. Kita telah berdosa dan melakukan kesalahan karena kita menerima arbitrase. Kini, karena dosa dan kesalahan kita telah gamblang, maka kami kembali kepada Tuhan dan bertobat.

¹⁴*Ibid.*, 179-180.

Kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah seperti yang telah kami lakukan atau kami akan memisahkan diri darimu".¹⁵

Dalam perkembangannya, perpecahan para pendukung Ali yang sudah terjadi sebelumnya semakin tajam karena adanya perbedaan tingkat respons terhadap hasil *tahkîm*. Mereka yang tetap setia kepada Ali disebut sebagai kelompok Syi'ah, sedangkan mereka yang menyalahkan tindakan Ali karena tidak mau membatalkan arbitrase kemudian keluar dari barisan kelompok Ali dan menjadi kelompok Khawarij. Dengan demikian, kemunculan kelompok Khawarij dan Syi'ah itu semenjak awal telah menunjukkan coraknya sebagai kelompok politik daripada kelompok teologi, karena yang diperjuangkan adalah kepentingan politik kelompok masing-masing. Kelompok Syi'ah tetap kokoh memperjuangkan hak kekuasaan Ali sebagai khalifah, sementara kelompok Khawarij tidak lagi mengakui hak kepemimpinan Ali dan mengklaim bahwa kepemimpinan merupakan hak setiap kaum muslim. Karena itu Fakhry menyebut kedua kelompok di atas sebagai aliran *religio-politik* atau aliran politik-keagamaan.¹⁶

Perkembangan Aliran Religio-Politik Syi'ah dan Khawarij

Perkembangan Aliran Syi'ah

Menurut bahasa, kata *Syi'ah* berarti *sahabat atau pengikut*. Dalam perkembangannya, makna itu mengandung kekhususan, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut para pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib dan *ahl al-bayt*. Menurut al-Syahrastâni, sebagaimana dikutip Nourouzzaman Shiddiqi,¹⁷ Syi'ah adalah nama bagi mereka yang menjadi pengikut Ali, dan meyakini bahwa keimanan dan kekhalifahan itu melalui proses wasiyat. Akidah yang menopang keberagamaan kaum Syi'ah berporos pada *imâmah* dan kecintaan kepada imam sebagai pembawa petunjuk, bersifat *ma'sûm* dan suci dan diyakini sebagai pengemban 'makna tersembunyi' dari ayat-ayat al-Qur'an.

¹⁵*Ibid.*, 180-181.

¹⁶Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, ter. R. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), 72-77.

¹⁷Nourouzzaman Shiddiqi, *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 6.

Mereka meyakini bahwa Nabi telah mewariskan kemampuan memahami 'makna tersembunyi' itu kepada Ali.

Isu politik menjadi isu yang sangat menonjol yang mengiringi kelahiran kelompok Syi'ah. Munculnya kelompok Syi'ah tidak dapat dipisahkan dari ide mengenai hak Ali dan keturunannya sebagai pihak yang memiliki hak kekhalifahan. Isu itu dikembangkan oleh keluarga besar Bani Hasyim, yang kemudian populer dengan sebutan *ahl al-bayt*, termasuk di dalamnya sahabat Ali. Tuntutan kelompok *ahl al-bayt* untuk menjadi imam telah disuarakan semenjak sepeninggal Nabi. Hal itu paling kurang dibuktikan dengan ketidakhadiran kelompok *ahl al-bayt*, terutama Ali dalam pembicaraan di Tsaqîfah Bani Sa'îdah yang dilangsungkan segera setelah wafatnya Rasulullah. Sementara sebagian kaum muslim sedang melangsungkan musyawarah di Tsaqîfah Bani Sa'îdah, di rumah Fathimah, Ali sedang memimpin sebuah rapat yang dihadiri seluruh keluarga Bani Hasyim untuk membicarakan mengenai kemungkinan Ali menjadi khalifah menggantikan Nabi.¹⁸ Namun isu tentang hak kepemimpinan *ahl al-bayt* mereda ketika Ali memberikan baiatnya kepada para khalifah pendahulunya, yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan.

Paparan historis di atas menunjukkan bahwa kemunculan aliran Syi'ah itu semenjak awal memang didorong oleh hasrat politik untuk berkuasa dari kalangan *ahl al-bayt*. Kemudian klaim politik itu ditopang dengan doktrin-doktrin agama, khususnya hadis Nabi yang berbicara mengenai kewalian Ali yang terkenal dengan Hadis Ghadir Khum.¹⁹ Selain didukung dengan doktrin

¹⁸ Syibli Nu'mani, *Umar yang Agung: Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, ter. Karsijo Djojosuwarno (Bandung: Pustaka, 1991), 75.

¹⁹ Ghadir Khum adalah sebuah tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah (daerah yang dekat dengan al-Juhfah saat ini). Tempat itu adalah tempat di mana orang dari berbagai daerah yang berbeda biasa bertemu dan saling menyapa sebelum mengambil rute yang berbeda menuju daerah masing-masing. Selengkapnya hadis ini menyatakan: "Muhammad saw. berangkat pada malam hari langsung ke Madinah. Setibanya di Ghadir Khum pada tanggal 18 Dzulhijjah beliau berhenti dan menyampaikan suatu ucapan wahyu. Dengan memegang tangan Ali beliau berkata: "Apakah aku tidak dicintai oleh orang-orang mukmin lebih daripada mereka sendiri". Dijawab (oleh yang hadir): "Benar ya Rasulullah". Kemudian beliau

kewalian Ali, klaim atas hak kekhalifahan Ali juga didukung dengan fakta kesejarahan tentang kedekatan Ali dengan Rasulullah, seperti kedudukannya sebagai menantu Rasulullah, pengorbanannya untuk menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya ketika Rasulullah meninggalkan Mekkah untuk hijrah ke Yatsrib. Bagi kelompok *ahl al-bayt*, berbagai fakta kesejarahan itu telah cukup bagi Ali untuk mendapatkan kedudukan sebagai khalifah menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam.

Klaim teologis kelompok Syi'ah di atas sepenuhnya disangkal dan ditolak oleh kelompok Islam Sunni. Bahkan persolan itu kemudian menjadi salah satu doktrin yang membedakan aliran Syi'ah dengan aliran-aliran lainnya. Para penganut Islam Sunni menganggap doktrin Syi'ah tersebut salah dan menyimpang. Sebaliknya, kalangan penganut Islam Syi'ah menjadikan klaim politis dan teologis atas hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai inti dari ajaran kepemimpinan kelompok Syi'ah. Karena itu, garis kepemimpinan dibatasi hanya pada orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, proses penggantian imam berlangsung melalui wasiat (penunjukan) dari imam sebelumnya. Persoalan siapa yang berhak mendapat wasiat untuk menjadi imam menjadi objek perdebatan, pertikaian, dan perselisihan di kalangan Syi'ah dari waktu ke waktu.²⁰

mengatakan: “Barang siapa mengakui aku sebagai pemimpinnya, maula, akan mengakui pula Ali sebagai pemimpinnya! Selanjutnya Rasulullah bersabda: “Hai manusia, aku kini akan meninggalkan kalian dan kalian akan menjumpai aku kelak di mata air di surga... Di situ aku akan menyanai kalian akan dua khazanah, maka hati-hatilah terhadap bagaimana kalian menjaga dua khazanah itu”. Para anggota rombongan bertanya: “Apa sajakah dua khazanah itu ya Rasulullah?” Nabi menjawab: “Khazanah yang terbesar adalah Kitabullah, karena dia dari Allah, yang diberikan sebagaimana apa adanya oleh ‘tangan’ Allah untuk dipercayakan kepada tangan-tanganmu. Berpegang teguhlah padanya, jangan hilangkan dan atau menukar-nukarnya. Khazanah yang satu lagi adalah garis keturunanku, *ahl al-bayt*”. Hadis itulah yang kemudian dikenal sebagai Hadis Ghadir Khum.

²⁰M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, ter. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1997), 32.

Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, para pendukung setianya (Syi'ah) mulai mencari pemimpin (imam) baru tempat menaruh harapan akan masa depan mereka. Pilihan jatuh pada Hasan sebagai putra tertua Ali dan Fathimah. Namun karena dianggap tidak memiliki kecakapan dan ambisi politik, kemudian ia digantikan oleh adik kandungnya Husein. Pada masa inilah gerakan politik kaum Syi'ah dimulai dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Husein meski kemudian berakhir tragis dengan pembantaian terhadap Husein dan pengikutnya oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 680 M di Karbala itu kemudian selalu diperingati oleh para penganut Syi'ah setiap tanggal 10 Muharram menurut kalender Hijriyah.

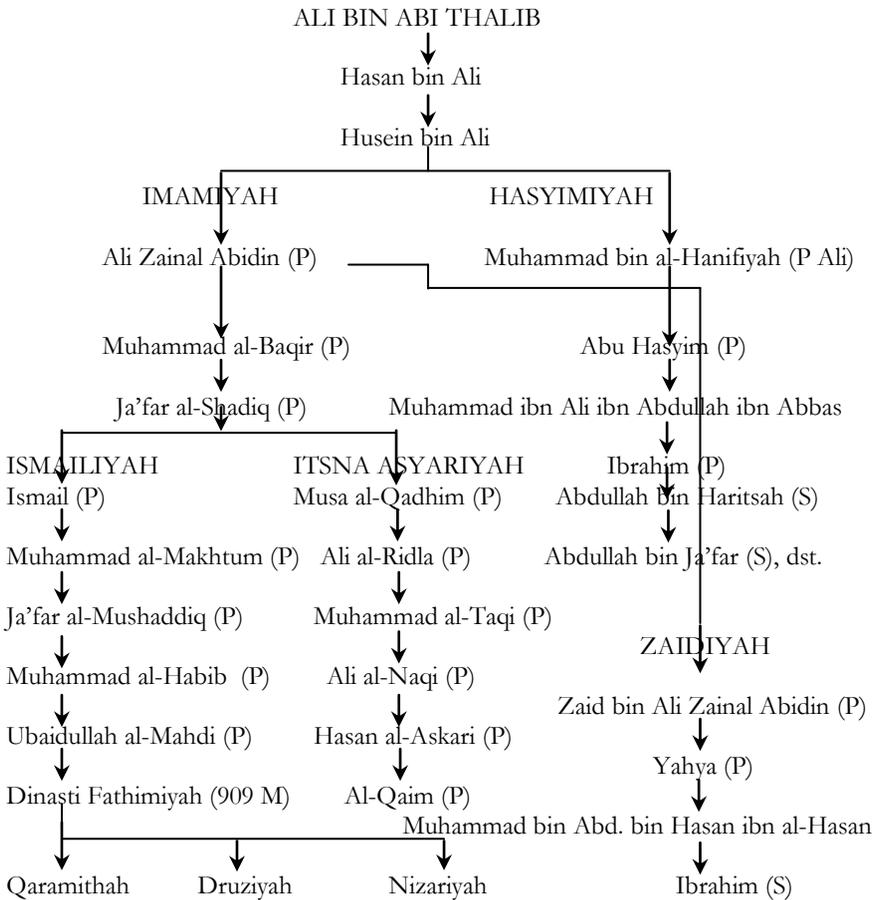
Semenjak masa itu dan masa-masa selanjutnya, sejarah golongan Syi'ah adalah sejarah tentang kepedihan pencarian pribadi-pribadi yang memiliki martabat spiritual sebagai seorang imam,²¹ dan sekaligus yang dapat memenuhi harapan-harapan yang disandarkan padanya. Kesulitan menemukan figur yang memenuhi kriteria ideal seorang imam setelah meninggalnya al-Husen mendorong sebagian pengikut Syi'ah meluaskan cakupan hak *imâmah* tidak hanya kepada anak keturunan Ali dan istrinya Fatimah, tetapi juga mereka yang berasal dari keturunan Ali dan istrinya dari Banu Hanifah. Pandangan semacam itu muncul ketika mereka berselisih paham dalam menetapkan pengganti dari Imam Husein yang mati di padang Karbala.²² Mereka yang tetap mengakui keturunan Imam Husein sebagai imam berikutnya, meski masih balita, selanjutnya menjadi kelompok Imamiyah, sementara yang menolak kemudian menjadi sekte Syi'ah Hasyimiyah.

Perbedaan pilihan atas imam terus memunculkan sekte-sekte baru dalam aliran Syi'ah. Dari kelompok Imamiyah berkembang tiga sekte besar, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, dan Itsna Asyariyah.

²¹Watt, *Pemikiran...*, 33.

²² Tragedi Karbala yang terjadi pada tahun 61 H/680 M merupakan peperangan antara tentara Syi'ah yang dipimpin oleh Husein dengan tentara Yazid bin Mu'awiyah. Namun karena jumlahnya yang tidak berimbang, maka peperangan itu kemudian menjadi pembantaian terhadap al-Husen dan tentaranya sehingga tewas seluruhnya.

Zaidiyah adalah mereka yang mendukung Zaid ibn Ali Zainal Abidin sebagai imam. Sedangkan Ismailiyah dan Itsna Asyariyah muncul dari garis keturunan Ja'far al-Sadiq. Kemudian dari kelompok Ismailiyah muncul beberapa sekte, yaitu: Qaramithah, Druziyah, dan Nizariyah. Perkembangan sekte Syi'ah selengkapnya sebagaimana tergambar dalam skema berikut.



Perkembangan Aliran Khawarij

Khawarij berarti orang-orang yang pergi ke luar atau memisahkan diri. Istilah itu kemudian mempunyai makna khusus, yaitu digunakan untuk menyebut mereka yang memisahkan diri dari kelompok Ali. Kalau aliran Syi'ah muncul didorong oleh hasrat politik kelompok *ahl al-bayt*, dan sudah mulai terbentuk semenjak meninggalnya rasulullah, kelompok

Khawarij muncul lebih belakangan, tepatnya ketika Ali telah menjadi khalifah menggantikan sahabat Usman.

Sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya, munculnya kelompok Khawarij bermula dari krisis politik yang mendera kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Naiknya Ali menjadi khalifah menggantikan Usman bin Affan diwarnai oleh kekecewaan para pendukung khalifah ketiga itu. Puncak kekecewaan itu adalah berupa tindakan makar yang dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, salah seorang pendukung setia khalifah Usman, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syria. Pembangkangan Mu'awiyah ditunjukkan dengan penolakannya terhadap keputusan Khalifah Ali yang memberhentikannya dari jabatannya sebagai gubernur. Keputusan Khalifah Ali itu ditanggapi oleh Mu'awiyah dengan dua tuntutan, yaitu: ekstradisi serta mengadili para pembunuh Usman, dan keharusan khalifah Ali turun dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Majelis Syura. Setelah upaya persuasif tidak membawa hasil, kemudian Khalifah Ali mengirimkan pasukannya untuk menegakkan kekhalifahannya yang sah sehingga pecah pertempuran antara kedua belah pihak dalam perang Shiffin yang berakhir dengan arbitrase.²³

Meski pada awalnya Khalifah Ali menolak tawaran gencatan senjata karena menganggap itu hanya sebagai taktik Mu'awiyah, namun atas pertimbangan ajaran Islam yang melarang menolak ajakan berdamai, khalifah menerima tawaran Mu'awiyah itu. Langkah Khalifah Ali ini merupakan awal bencana bagi kedudukan kekhalifahannya. Sekali lagi, atas desakan para pengikutnya Khalifah Ali memilih orang yang kurang tepat sebagai utusan untuk bernegosiasi dalam perundingan dengan pihak Mu'awiyah. Khalifah Ali yang sebelumnya cenderung memilih salah satu di antara Abdullah bin Abbas atau Malik al-Asytar, kemudian justru menetapkan Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan dari pihak Khalifah Ali. Sementara itu Mu'awiyah mengutus Amr bin Ash, yang terkenal pandai dan cerdik berdiplomasi, untuk mewakili kelompoknya dalam *tabkîm*

²³*Ibid.*, 36.

(arbitrase). Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan, hasil *tahkîm* justru sangat merugikan Khalifah Ali sebagai pemegang kekuasaan kekhalifahan yang sah, bahkan kemudian menyebabkan Khalifah Ali kehilangan kekuasaannya.²⁴

Hasil *tahkîm* yang menguntungkan pihak Mu'awiyah dan merugikan pihak Ali sebagai khalifah yang sah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi sebagian pengikut Ali, sebagian besar dari Bani Rasib dan Tamim. Karena desakannya kepada Khalifah Ali untuk membatalkan hasil *tahkîm* ditolak, maka mereka kemudian memisahkan diri dari kelompok Ali sehingga kemudian mereka dinamakan dengan *Khawarij*. Mahmoud M. Ayoub menggambarkan orang-orang Khawarij itu sebagai orang-orang saleh yang mengisi malam-malam mereka dengan salat dan membaca al-Qur'an. Namun, kesalehan mereka yang teguh itu dibarengi dengan individualisme yang keras dan egalitarianisme yang kaku".²⁵ Bagi mereka, hasil *tahkîm* yang mengakibatkan hilangnya jabatan kekhalifahan Ali yang sah secara legal-formal, mengakibatkan ketidakpastian masa depan para pendukung Ali, yang sebagian di antaranya sangat mungkin memiliki agenda-agenda politik untuk masa depan mereka masing-masing. Harapan-harapan politik, seperti keinginan untuk memperoleh kedudukan politik dalam kekhalifahan Ali, yang telah dibangun sebelumnya menjadi sirna.

Kekecewaan sebagian pendukung Ali di atas kemudian berubah menjadi keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kapasitas Ali sebagai pemimpin mereka. Ketidakpercayaan kepada Ali kemudian berubah menjadi sikap mempersalahkan Ali atas terjadinya situasi politik yang tidak menguntungkan itu. Bahkan, mereka menganggap bahwa kesalahan Ali tidak hanya kesalahan politik, tetapi juga kesalahan teologis dikarenakan telah memilih *tahkîm* dan mengabaikan hukum Allah (al-Qur'an). Selanjutnya, tuduhan melanggar hukum Allah itu tidak hanya di arahkan kepada Ali, tetapi juga kepada Mu'awiyah, dan semua pihak yang terlibat dalam *tahkîm*. Mereka dianggap telah melanggar hukum Allah dan dinyatakan telah melakukan dosa

²⁴Philip K. Hitti, *History of the Arab From the Earliest Time to the Present* (London: MacMillan, 1973), 181.

²⁵Ayoub, *The Crisis...*, 175.

besar sehingga menjadikan mereka tidak lagi sebagai mukmin, sebaliknya telah kafir. Mereka ini terkenal dengan sembojannya *lâ hukma illâ Allâh* (tiada hukum kecuali hukum Allah). Berdasarkan doktrin ini mereka menyalahkan dan mengkafirkan orang-orang yang terlibat dalam *tabkîm* Shiffin, terutama Ali dan Mu'awiyah, karena telah mengingkari hukum Allah dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Doktrin *lâ hukma illâ Allâh* dalam perkembangannya kemudian menjelma menjadi gerakan kekerasan melawan orang-orang yang dianggap telah melanggar hukum Allah. Tindakan kekerasan itu kemudian juga ditujukan kepada mereka yang tidak sependirian atau tidak mendukung doktrin yang mereka yakini sehingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan atas nama fanatisme buta. Di bawah kepemimpinan Abdullah bin Wahab al-Rasibi, kelompok Khawarij melancarkan gerakan-gerakan mereka dari kota Nahrawan. Dari kota ini, dengan kekuatan ± 1.800 orang mereka menyerang pasukan Ali yang sedang bersiap-siap menuju Syiria. Namun pasukan Ali berhasil menumpas gerakan mereka hingga tersisa beberapa orang saja. Tindakan Ali itu semakin mengeraskan sikap kelompok Khawarij untuk menentang dan memerangi siapapun selain kelompok mereka sendiri, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemudian salah seorang pengikut Khawarij, Abdullah ibnu Muljam al-Muradi, berhasil membunuh Ali.²⁶

Berbeda dengan kelompok Syi'ah yang meyakini adanya pewarisan atau penunjukan dalam kepemimpinan (*imâmah*), kelompok Khawarij menyerahkan kepemimpinan kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan. Dalam pandangan Khawarij, setiap muslim yang saleh berhak untuk menjadi pemimpin.²⁷ Seorang pemimpin kaum muslim tidak harus keturunan suku Quraisy, tidak harus keturunan Nabi Muhammad, tidak harus keturunan Ali, dan tidak harus memiliki keturunan dengan pemimpin sebelumnya. Dengan pandangan seperti di atas, maka Khawarij berupaya mengembangkan semangat egalitarianisme (kesetaraan) meski hanya terbatas dalam permasalahan hak kepemimpinan.

²⁶Siddiqi, *Syi'ah...*, 41

²⁷Fakhry, *Sejarah...*, 74.

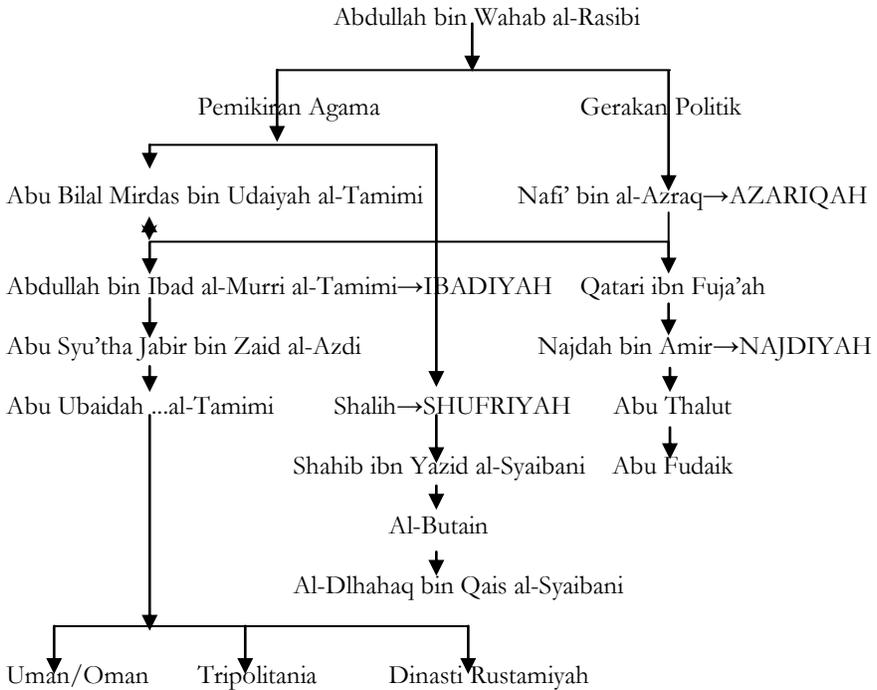
Secara internal, pandangan Khawarij itu justru menimbulkan dampak yang kurang positif karena tidak ada pemimpin mereka yang memiliki pengaruh kepada seluruh anggota kelompok Khawarij. Kondisi itu menjadi salah satu pendorong timbulnya perpecahan dalam kelompok Khawarij menjadi sekte-sekte kecil yang mandiri dan otonom. Sekte-sekte itu kemudian melakukan gerakan-gerakan yang berdiri sendiri pada wilayah-wilayah geografis yang terpisah. Karena itu kelompok Khawarij tidak pernah menjadi kelompok yang besar dan berpengaruh secara luas dalam kehidupan masyarakat muslim. Mereka tetap menjadi kelompok minoritas, sebagaimana yang terjadi pada saat kemunculannya, tidak hanya dari segi jumlah pengikut tetapi juga karena pandangan teologisnya. Namun karena kekerasan keyakinan dan militansinya dalam beragama menyebabkan kelompok Khawarij dapat terus bertahan dan menyibukkan para penguasa ketika itu untuk melakukan penumpasan-penumpasan terhadap pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij.

Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok Khawarij menyebabkan para penguasa ketika itu berupaya menumpas gerakan Khawarij. Tekanan yang semakin keras dari penguasa ketika itu, khususnya dari penguasa Umayyah dan Ibnu Zubair yang menguasai Makkah, Gerakan Khawarij terpecah menjadi dua, yaitu: kelompok politik di bawah kepemimpinan Nâfi' bin al-Azrâq dan kelompok keagamaan di bawah kepemimpinan Abû Bilâl Mirdas bin Udaiyah al-Tamîmî.²⁸ Selanjutnya dari kedua kelompok itulah muncul sekte-sekte dalam Khawarij, baik yang termasuk dalam kelompok ekstrim (garis keras) maupun yang moderat.

Dari kelompok Abû Bilâl Mirdas itulah kemudian lahir sekte al-Shufriyah dan kelompok Ibadiyah yang kemudian menjadi kelompok Khawarij yang paling moderat sehingga dapat bertahan sampai kini, meski jumlah pengikutnya hanya tinggal ratusan orang saja. Sementara dari kelompok Nâfi' bin al-Azrâq lahir sekte Khawarij yang ekstrim, yaitu Azraqiyah dan Najdiah. Kedua sekte itu telah musnah disebabkan kekerasan mereka

²⁸Siddique, *Syi'ah*..., 43.

telah mengundang penguasa-penguasa yang ada saat itu terus menerus menumpas gerakan-gerakan mereka. Termasuk yang musnah karena ditumpas para penguasa adalah sekte al-Shufriyah. Selengkapnya, garis kepemimpinan sekte-sekte dalam kelompok Khawarij dapat digambarkan dalam skema berikut.



Pandangan Teologi Syi'ah dan Khawarij

Tidaklah mudah untuk dapat merumuskan ajaran Syi'ah dalam bidang teologi, karena pada dasarnya gerakan Syi'ah, sebagaimana dipaparkan di atas, baik pada awal kelahirannya maupun pada akhirnya lebih menampakkan sebagai gerakan politik dibanding gerakan teologi. Karena itu, pemikiran teologi aliran Syi'ah tidak dapat dipisahkan dengan konsep Syi'ah tentang imamah.

Dalam pandangan Syi'ah Imâmiyah (*Itsna Ayyari'ah*) keimanan kepada seorang imam menjadi doktrin yang fundamental dalam keseluruhan ajaran teologi. Mereka meyakini bahwa Ali telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai imam (penggantinya). Mekanisme penggantian imam melalui

penunjukkan itu menjadi keyakinan di kalangan Syi'ah dalam menentukan seorang imam. Keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan yang lain dalam Syi'ah bahwa seorang imam itu ditakdirkan untuk memiliki karisma dan terhindar dari kesalahan-kesalahan.²⁹ Keyakinan tentang hak keimaman Ali itu mengakibatkan munculnya pandangan yang kurang menghargai sahabat-sahabat Nabi yang dianggap telah merampas hak Ali untuk menggantikan kedudukan sebagai imam ketika beliau wafat.

Sedangkan dalam persoalan lainnya, secara umum pandangan-pandangan teologi aliran Syi'ah disebutkan memiliki kesamaan-kesamaan dengan pandangan umum aliran Mu'tazilah, misalnya dalam permasalahan al-Qur'an. Sekte Syi'ah Imâmiyah (*Itsna Asyari'ah*) memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk.³⁰

Di antara doktrin teologis sekte Ismailiyah terdapat kesamaan dengan pandangan Sunni, misalnya mengenai kemampuan yang dapat dicapai akal. Dalam pandangan Syi'ah Ismailiyah, kemampuan akal sangat terbatas, sehingga tidak mampu menggapai kebenaran sejati. Kebenaran sejati hanya dapat diterima dari Nabi atau dari salah seorang imam.³¹ Dengan pandangan semacam ini, maka secara teologis kedudukan seorang Nabi atau imam merupakan keharusan bagi manusia untuk dapat mencapai kebenaran.

Sebagaimana kelompok religio-politik Syi'ah, perhatian utama aliran Khawarij adalah pada persoalan politik (kepemimpinan). Namun tidak berarti, aliran Khawarij tidak membahas persoalan teologi, bahkan sebaliknya, mereka dianggap sebagai kelompok yang pertama melontarkan persoalan teologi dalam Islam, yaitu persoalan pelaku dosa besar. Berangkat dari doktrin *lâ hukma illâ Allâh* yang mereka yakini, aliran Khawarij sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang telah melanggar hukum Allah atau tidak menggunakan hukum Allah dalam memutuskan perkara dianggap telah melakukan

²⁹*Ibid.*, 67.

³⁰*Ibid.*, 121.

³¹*Ibid.*, 125.

dosa besar (*kabīrah*). Mereka yang dimaksudkan oleh Khawarij telah melanggar hukum Allah yaitu Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin Ash, dan orang-orang yang terlibat dalam *tabkīm* sebagai upaya penyelesaian peperangan yang terjadi antara pihak Ali dan Mu'awiyah. Menurut Khawarij, mereka telah melanggar hukum Allah sehingga kehilangan status kemukminannya dan menjadi kafir. Apabila pelakunya adalah seorang khalifah atau pemimpin, maka hak kepemimpinannya menjadi batal dan hilang. Ia harus diturunkan dari jabatannya dan dihukum sebagai orang kafir, yaitu dibunuh. Dalam pandangan Khawarij, status kafir dan keabsahan untuk dibunuh tidak ada perbedaan penyebabnya, baik karena pelanggaran politik maupun pelanggaran terhadap peraturan agama.³²

Tuduhan kafir yang dilontarkan oleh Khawarij kepada pelaku dosa besar mengantarkan pada kajian tentang konsep iman dalam Islam. Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir karena yang bersangkutan tidak lagi beriman, imannya telah hilang dikarenakan perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Dalam pandangan Khawarij, iman adalah amal (perbuatan), yaitu bentuk perilaku yang sesuai dengan makna lahiriah hukum Allah (al-Qur'an).³³ Karena itu, apabila seseorang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan makna lahiriah kitab suci (al-Qur'an), maka yang bersangkutan telah melakukan dosa besar, dan berarti telah kafir atau tidak lagi beriman. Dalam perkembangannya, masing-masing sekte memaknai doktrin teologis di atas secara agak berbeda sehingga mempengaruhi tingkat ekstrimitas masing-masing sekte yang ada dalam aliran Khawarij.

Sekte yang paling ekstrim (keras) dalam aliran Khawarij yaitu sekte Azraqiyah (Azariqah). Doktrin teologis di atas wilayah cakupannya diperluas oleh kelompok Azariqah pada wilayah politik dengan mengatakan bahwa para penguasa yang ada saat itu telah berbuat dosa.³⁴ Karena penguasanya telah berbuat dosa,

³²*Ibid.*, 73.

³³*Ibid.*

³⁴Hal itu dikarenakan, menurut Khawarij, pemerintahan yang ada ketika itu dihasilkan dari mekanisme *tabkīm* yang melanggar hukum Allah. Naiknya

maka pemerintahannya menjadi tidak absah dan harus diperangi. Lebih jauh lagi, menurut sekte Azariqah, kaum muslim yang tidak bergabung dengan mereka untuk memerangi penguasa yang telah berbuat dosa juga termasuk telah berbuat dosa. Mereka menganggap kelompoknya sebagai representasi paling absah dari komunitas muslim sejati (*dâr al-Islam*). Kaum muslim yang tidak mau bergabung dan tetap berada di komunitas asal berarti telah berbuat dosa dan berada di wilayah kafir (*dâr al-Kufr*). Konsekuensinya, mereka beserta sanak keluarganya sah untuk dibunuh.³⁵

Doktrin teologis seperti di atas menjadi landasan bagi sekte Azariqah untuk menyerukan dilakukannya pembunuhan kepada para pemimpin politik ketika itu, dan juga tindakan teror kepada kelompok-kelompok lain yang tidak sepandangan dengan mereka.³⁶ Tindakan kekerasan yang dilakukan sekte Azariqah tergambar dalam proses penerimaan anggota baru dalam kelompok mereka. Persyaratan bagi anggota baru mereka adalah dengan membunuh orang yang berasal dari satu suku yang menolak untuk masuk menjadi anggota sekte Azariqah. Tindakan itu menyebabkan putusannya hubungan persaudaraan atau hubungan suku antara pelaku dengan orang yang dibunuh. Namun tidak begitu jelas apakah hal itu merupakan peraturan atau hanya kejadian yang sifatnya insidental.³⁷

Sekte yang lebih moderat dari Azariqah yaitu Najdiah yang para pengikutnya sebagian besar berasal dari Arabia Tengah (Yamamah). Berbeda dengan sekte Azariqah yang menganggap kelompok lain sebagai kafir, sekte Najdiah menganggap kelompok lain yang tidak sepandangan sebagai kelompok munafik. Mereka juga memiliki pemahaman tentang menyembunyikan keimanan (*taqiyyah*) bagi anggota sektenya yang berada di wilayah bukan Khawarij. Sekte Najdiah tidak secara

Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah merupakan kemenangan politis yang dihasilkan dari *tahkîm* Shiffin yang merugikan pihak Ali sebagai khalifah. Ketidaksetujuan terhadap hasil *tahkîm* yang merugikan pihak Ali inilah yang mendorong lahirnya kelompok Khawarij.

³⁵Watt, *Pemikiran...*, 19.

³⁶Arkoun dan Gardet, *Islam...*, 30.

³⁷Watt, *Pemikiran...*, 20.

tegas memisahkan wilayah menjadi *dâr al-Islam* (wilayah Islam) dan *dâr al-Kufr* (wilayah kafir). Nampaknya pembedaan kedua wilayah itu hanya didasarkan pada aspek yang fundamental dalam Islam, seperti pelanggaran terhadap syirik, sehingga pelanggaran lainnya, seperti pencurian dan perzinahan tidak menjadikan pelakunya disebut kafir.³⁸

Secara umum semua sekte Khawarij mengklaim sebagai jama'ah Islam sejati dan pentingnya kesetiaan spiritual kepada jama'ahnya. Pandangan itu mendorong sekte-sekte yang ekstrim menolak adanya hubungan kerjasama dengan kelompok di luar Khawarij, kecuali sekte Ibadiyah. Menurut mereka, yang harus diperangi adalah pemerintahnya, dan bukan masyarakatnya.³⁹ Namun, sikap moderat mereka tetap saja tidak menghapus karakteristiknya sebagai kelompok khawarij yang eksklusif dan mengisolir diri dari wilayah pemerintahan dan masyarakat yang mereka anggap kafir.

Catatan Akhir

Dalam tataran ideal Islam antara agama dan politik merupakan dua sisi dari jalan yang tunggal. Politik merupakan aspek dari syari'ah Islam, dan menjadi alat mencapai tujuan syari'ah yang bersifat moral. Kondisi ideal itu berlangsung sepanjang kepemimpinan Nabi Muhammad saw., khalifah Abu Bakar al-Siddiq, dan Umar bin al-Khattab. Masa setelah itu, sebagaimana terlihat pada paparan sejarah di atas menunjukkan adanya perubahan ke arah sebaliknya, di mana syariah menjadi alat mencapai tujuan politik (kekuasaan). Akibatnya, timbul konflik di antara kaum muslim karena masing-masing kelompok memaksakan kepentingan politiknya. Kondisinya menjadi semakin parah ketika nilai-nilai tribalisme juga semakin menguat, sehingga menjadi bagian dari upaya balas dendam. Sedangkan doktrin-doktrin agama menjadi alat legitimasi kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan kesukuan.

Munculnya Khawarij dan Syi'ah didasari kuatnya kepentingan politik kesukuan yang menguat kembali semenjak kekhalifahan

³⁸*Ibid.*, 21.

³⁹Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), 20.

Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Berbeda dengan aliran-aliran yang muncul sebelumnya, aliran-aliran yang lahir belakangan lebih banyak dilatar belakangi kepentingan untuk merumuskan ajaran-ajaran ketuhanan. Namun demikian, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan di atas, sehingga dibutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengkajinya. ●

Daftar Pustaka

- Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986).
- M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, ter. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1997).
- Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, ter. Munir A. Mu'in (Bandung: Mizan, 2004).
- Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, ter. R. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).
- Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Peradaban Dunia*, Jilid Pertama: Masa Klasik Islam, Buku Pertama: Lahirnya Sebuah Tatanan Baru, ter. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- _____, *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: PLP2M, 1985).
- Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984).
- Philip K. Hitti, *History of the Arab From the Earliest Time to the Present* (London: MacMillan, 1973).
- Syibli Nu'mani, *Umar yang Agung: Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, ter. Karsijo Djojosuwarno (Bandung: Pustaka, 1991).
- W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, ter. Umar Basalim (Jakarta: P3M, 1987).